



**Judul** : Komisi XI ingin OJK tuntaskan kasus DSI  
**Tanggal** : Senin, 30 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Pulihkan Kepercayaan Publik Komisi XI Ingin OJK Tuntaskan Kasus DSI

TUGAS berat menanti jajaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2026-2032 yang baru dilantik. Salah satunya, penuntasan kasus dugaan penipuan investasi Dana Syariah Indonesia (DSI), karena total kerugian mencapai angka fantastis Rp 2,47 triliun.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar meminta OJK terlibat langsung dalam pengusutan alur dana secara menyeluruh agar tidak ada yang ditutup-tutupi. Penyelesaian skandal ini jadi ujian pertama sekaligus titik balik memulihkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas regulator.

Transparansi lembaga itu sangat ditunggu masyarakat luas. Kasus ini, kata Marwan, telah memakan korban sebanyak 11.151 pemberi dana atau lender, dan hingga kini nasib dananya masih terkatung-katung. Padahal DSI sudah mengantongi izin dan berada di bawah pengawasan OJK sejak Februari 2021. "Nasib dana ribuan orang itu harus jadi perhatian serius," tegasnya, kemarin.

Marwan menegaskan, pengembalian dana nasabah harus dilakukan secara utuh. Untuk itu, OJK wajib meningkatkan koordinasi dengan Ditipideksus Bareskrim Polri untuk memastikan aset hasil kejahatan disita. Seluruh barang bukti itu harus segera dikembalikan kepada para korban yang terdampak.

Bareskrim Polri, lanjutnya, memiliki wewenang menanganai unsur pidana, sementara OJK berwenang dalam hal pengawasan dan administrasi. Seluruh dana korban harus kembali tanpa pengecualian atau pengurangan apa pun.

"Kasihani, banyak persiapan kehilangan dana, untuk itu Negara harus hadir untuk melindungi mereka," ingatnya.

Selanjutnya, Marwan mendorong adanya audit internal besar-besaran di tubuh OJK agar sistem pengawasan segera dievaluasi. Pasalnya, masyarakat mempertanyakan mengapa lembaga di bawah pengawasan ketat bisa melakukan penyimpangan hingga triliunan rupiah tanpa terdeteksi. Evaluasi total mutlak dilakukan agar celah serupa tidak dimanfaatkan oknum.

Katanya, jangan sampai hal itu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada regulator. OJK harus jadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat, bukan justru sebaliknya. "Kasus ini harus jadi bahan evaluasi total mengapa DSI yang berada dalam pengawasan bisa menyebabkan kerugian besar," ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menambahkan, dalam kasus ini OJK memiliki peran strategis memastikan prinsip syariah tercermin dalam praktik pengelolaan dana. Pengawasan konsisten dan penegakan tata kelola baik diperlukan agar ekosistem keuangan syariah tumbuh sehat. Perlindungan konsumen harus tetap jadi prioritas utama dalam industri.

Perkembangan kasus DSI, kata dia, harus jadi momentum evaluasi bersama memperkuat standar etika dan manajemen risiko industri fintech syariah. Hak masyarakat harus terpenuhi, agar kepercayaan publik terhadap keuangan syariah nasional tetap kokoh. Semua pihak wajib menjaga integritas sistem keuangan syariah di Indonesia. ■ PYB